Kemendag Bakal Atur Diskon Perdagangan E-commerce

Tanggal : Sabtu , 06 Maret 2021
Media : Tribunjateng.com
Halaman : 3
Wartawan : Kontan/Lktya Yuniartha
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik : tribun biz
Topik : E-commerce

Kemendag bakal Atur Diskon Perdagangan E-commerce

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) tengah berupaya agar perdagangan di Indonesia menerapkan asas perdagangan yang adil. Kemendag pun berupaya mengatasi praktik-praktik kecurangan seperti price predatory, terutama pada perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan aturan terkait e-commerce, satu di antaranya terkait dengan pemberian diskon. Hal itu disebut sebagai kebijakan untuk memberikan kesetaraan dalam perdagangan.

"Masalah harga tentunya adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Tetapi untuk urusan diskon ini akan kami regulasi. Jadi tidak bisa sembarangan dengan alasan diskon, perusahaan-perusahaan digital ini mendeploy atau melaunch, mengerjakan predatory pricing," katanya, dalam konferensi pers, Kamis (4/3).

Ia tak menginginkan adanya diskon ini justru menjadi satu alasan bagi penjual untuk melakukan predatory pricing. Lutfi menjelaskan, diskon bukanlah sesuatu yang dilarang dalam perdagangan. Tetapi, perusahaan tidak boleh sengaja memberikan diskon untuk menghancurkan kompetisi.

"Jadi kalau dia mau melakukan diskon boleh, dia tidak boleh membakar uang untuk menghancurkan kompetisi. Itu prinsipnya. Jadi, diskon bukan sesuatu yang tabu dalam perdagangan, tapi ketika dikerjakan dengan niatan yang menghancurkan, itu adalah sesuatu yang tidak boleh," paparnya.

Lutfi menuturkan, aturan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik ini akan segera dirampungkan Maret ini. Menurut dia, dengan aturan itu, setiap pihak yang berjualan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

Dia menambahkan, Kemendag akan bertindak sebagai wasit atau regulator untuk memastikan perdagangan itu berjalan dengan adil dan bermanfaat. Bila pelaku di sektor e-commerce bisa mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik, mereka akan diizinkan untuk berdagang di Indonesia.

Lutfi menegaskan, Indonesia tak pernah memiliki sejarah melakukan proteksionisme, karena hal itu pun dianggap bisa merugikan perdagangan. "Kami jamin yang akan diregulasikan ini bukannya mengimpit perdagangan, tetapi sebenarnya memperbaiki perdagangan, supaya terjadi exchange antara penjual dan pembeli," tandasnya. **(Kontan/Lidya Yuniartha)**